



Available online at <http://joseta.faperta.unand.ac.id>

Journal of Socio Economics on Tropical Agriculture (Jurnal Sosial
Ekonomi Pertanian Tropis) (JOSETA)

ISSN: 2686 – 0953 (online)



ANALISIS PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI DI KELOMPOK TANI PATAMUAN KOTA PADANG

Analysis Of Subsidized Fertilizer Distribution In Patamuan Farmer Group In Padang City

Salim Halomoan¹, Dwi Evaliza², Zulvera²

¹Mahasiswa Program Studi Penyuluhan Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Padang, 25163, Indonesia

²Staff Pengajar Program Studi Penyuluhan Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Padang, 25163, Indonesia

email koresponden: dwievaliza@yahoo.com

Abstrak

Penyaluran pupuk bersubsidi sangat diperlukan bagi para petani di berbagai daerah Indonesia karena mayoritas petani di Indonesia memiliki penghasilan menengah ke bawah dan memerlukan pupuk untuk bertani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemyaluran pupuk bersubsidi di Kelompok Tani Patamuan Kota Padang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode survei. Jumlah seluruh responden sebanyak 42 petani dari total 71 orang populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik sampling acak sederhana. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengacu kepada Permendag No. 15 Tahun 2013, bahwa penyaluran pupuk bersubsidi harus sesuai dengan enam Azas Ketepatan, yaitu; Ketepatan Harga, Ketepatan Jumlah, Ketepatan Waktu, Ketepatan Tempat, Ketepatan Mutu, dan Ketepatan Jenis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi di kelompok tani Patamuan belum sesuai dengan enam ketepatan yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pemerintah, hal ini terjadi karena hanya dua jenis pupuk bersubsidi yang diterima oleh petani, sedangkan yang disalurkan oleh pemerintah ada tujuh jenis pupuk yang telah bersubsidi.

Kata Kunci: Analisis, Kartu Tani, Pupuk Subsidi

Abstract

The distribution of subsidized fertilizers is very necessary for farmers in various regions of Indonesia because most farmers in Indonesia have lower middle incomes and need fertilizer for farming. This study aims to (1) analyze the distribution of subsidized fertilizer in the Patamuan Farmer Group, Padang City. The method used in this study is to use the survey method. The total number of respondents was 42 farmers from a total population of 71 people. The sampling technique in this study used a simple random sampling technique. The results showed that the distribution of subsidized fertilizers in the Patamuan farmer groups was not in accordance with what had been determined by the government.

Keywords: Effectiveness, Farmer's Card, Subsidized Fertilizer

PENDAHULUAN

Subsidi pupuk merupakan salah satu kebijakan fiskal pemerintah untuk petani yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian. Kebijakan ini sudah ada sejak tahun 1960 dan juga pernah dihapuskan pada tahun 1998 saat krisis moneter dan diberlakukan kembali pada tahun 2001. Alokasi subsidi pupuk pada tahun 2020 ditargetkan sebanyak 8,9 juta ton dan realisasi penyalurannya mencapai 8,72 juta ton. Jumlah ini setara dengan 97,98% dari target penyaluran yang sudah ditentukan. Hal ini menunjukkan salah satu indikator efektivitas kebijakan subsidi pupuk adalah jumlah. rata rata alokasi subsidi pupuk tiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 alokasi subsidi pupuk dianggarkan 18,14 (miliar rupiah) sedangkan pada tahun 2019 alokasi subsidi pupuk naik menjadi 34,31 (miliar rupiah). Terdapat penurunan anggaran pada tahun 2012 dan juga pada tahun 2016, hal ini terjadi karena adanya ketidakefektifitasan penggunaan subsidi pupuk dan juga anggaran negara untuk subsidi pupuk yang terlalu tinggi pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 anggaran negara untuk subsidi pupuk mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya, yaitu dari 21,04 (miliar rupiah) menjadi 31,32 (miliar rupiah), sehingga koreksi dilakukan pada tahun 2016. Adapun anggaran diturunkan menjadi 26,85 (miliar rupiah) (Kementerian Keuangan, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan pupuk bersubsidi bagi petani rata rata mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Penggunaan pupuk bersubsidi diarahkan kepada penggunaan pupuk yang berimbang, baik organik maupun non organik sesuai rekomendasi spesifikasi lokasi dan standar teknis penggunaan pupuk yang dianjurkan. Sesuai dengan peraturan pemerintah pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 04/Kpts/RC.210/B/02/2020 tentang Pedoman

Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020. Peraturan ini menimbang perlunya ditetapkan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2020 dengan 13 pengimplementasiannya ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pedoman dalam menyediakan dan menyalurkan pupuk bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya.

Pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian diatur dalam Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2011 tentang pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasannya harus memperhatikan prinsip enam tepat, yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat, tepat harga, dan tepat mutu. Penyaluran pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak maksimal dua hektar dan bukan merupakan perusahaan, hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 6/Permentan/SR.140/2/2011 (Permentan, 2017).

Kebijakan pupuk bersubsidi dinilai berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas sektor pertanian dan pendapatan petani dikarena mayoritas petani di Indonesia memiliki penghasilan menengah ke bawah dan memerlukan pupuk untuk bertani, sementara harga pupuk yang tinggi membuat para petani berfikir untuk membelinya, maka penyaluran pupuk bersubsidi dari pemerintah tersebut sangat berguna bagi para petani karena mereka dapat membeli pupuk dengan harga yang terjangkau tetapi dengan kualitas yang baik.

Kegiatan usaha tani tidak akan pernah lepas dari permasalahan pemupukan maka melalui program pemerintah dengan adanya subsidi pupuk diharapkan para petani mendapat keringanan terhadap mahalny biaya pembelian pupuk, namun ketika program tersebut diimplementasikan ke masyarakat, secara

umum terdapat beberapa permasalahan seperti distribusi yang tidak adil dan tidak tepat sasaran, penggunaan pupuk yang berlebihan, biaya subsidi yang lebih besar dari manfaat, dan kurangnya pengawasan dan sanksi bagi para diskriminasi harga yang diterapkan antara sub sektor tanaman pangan dan non pangan, membuka peluang terjadinya aliran pupuk dari sub sektor tanaman pangan ke sub sektor non pangan dan juga kecenderungan untuk diekspor.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyaluran pupuk bersubsidi di Kelompok Tani Patamuan Kota Padang.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di Kelompok Tani Patamuan Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji Kota Padang. Pengambilan tempat penelitian ini dilakukan secara sengaja atau purposive dengan pertimbangan lokasi ini merupakan penerima kartu tani terbanyak di Kecamatan Kuranji. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2022 sampai bulan September 2022.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode survei. Metode survei merupakan penelitian yang menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data dari sampel suatu populasi yang telah ditentukan dan dibatasi (Singgarimbun dan Effendi 2006).

Metode Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota dari kelompok tani patamuan, jumlah populasinya adalah 71 orang. Metode penarikan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah Teknik Sampling Acak Sederhana. Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Yamane, dengan jumlah sampel 42 orang.

Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari responden di lapangan. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Wawancara menggunakan kuesioner ini dilakukan dengan petani. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari instansi dan lembaga terkait, Dinas Pertanian Kota Padang dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Nanggalo.

Variabel dan Indikator Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka variabel yang diamati yaitu: Penyaluran pupuk bersubsidi diukur dari enam indikator yaitu tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat mutu (Kementerian Perdagangan, 2013). Adapun indikator yang diamati yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan no 15 yaitu:

1. **Tepat Harga**
Tepat Harga dimana harga pembelian pupuk oleh petani secara kontan di tingkat pengecer atau kios resmi per sakunya sama dengan harga eceran tertinggi (HET).
2. **Tepat Tempat**
Tepat Tempat adalah suatu kondisi dimana pupuk tersedia dikios-kios sekitaran tempat tinggal petani (Rakhmawati, 2013).
3. **Tepat Waktu**
Tepat waktu menunjukkan apakah pupuk bersubsidi selalu tersedia disaat petani membutuhkan untuk pemupukan baik pemupukan dasar ataupun pemupukan setelah tanam.
4. **Tepat Jumlah**
Menurut Purwono dan Heni (2009), jumlah pupuk yang tepat berdasarkan status hara dan kebutuhan tanaman yang dianjurkan adalah kombinasi antara urea 200 kg/ha, TSP/SP-36 sebanyak 75-100 kg/ha, dan KCL sebanyak 75-100 kg/ha (Rakhmawati, 2013).
5. **Tepat Mutu**
Tepat mutu artinya bahwa pupuk bersubsidi tersebut harus bersertifikat SNI yang ditandai

dengan adanya logo SNI pada kemasan pupuk bersubsidi.

dengan menggunakan rumus sebagai berikut: Efektivitas:

Tabel 1. Analisis Data

No	Indikator	Kriteria	Pengukuran	Skor
1	Tepat Harga	Harga Urea Rp.1800 / Kg	Jika harga Pupuk Urea yang di terima petani sesuai dengan HET.	Sesuai=2 Tidak Sesuai=1
		Harga NPK 2.300 /Kg	Jika harga pupuk NPK yang diterima petani sesuai dengan HET.	Sesuai=2 Tidak Sesuai=1
2	Tepat Jumlah	Jumlah Urea	Jika jumlah Urea yangditerima petani sesuai dengan jumlah yang ditetapkan di dalam.	Sesuai=2 Tidak Sesuai=1
		Jumlah NPK	Jika jumlah NPK yang diterima petani sesuai dengan jumlah yang ditetapkan di dalam RDKK.	Sesuai=2 Tidak Sesuai=1
3	Tepat Tempat	Responden membeli di tempat pengecer resmi	harus Petani membeli pupuk di pengencer resmi.	Sesuai=2 Tidak Sesuai=1
4	Tepat Waktu	Selalu ada setiap petani membutuhkannya	Pupuk tersedia di saat petani membutuhkan.	Sesuai=2 Tidak Sesuai=1
		Pupuk Urea	Pupuk Urea yang diterima petani sudah berlogo SNI.	Sesuai=2 Tidak Sesuai=1
5	Tepat Mutu	Pupuk NPK	Pupuk NPK yang diterima petani sudah berlogo SNI.	Sesuai=2 Tidak Sesuai=1

6. Tepat Jenis

Tepat jenis artinya jenis pupuk bersubsidi yang diperoleh petani sesuai dengan kebutuhannya atau tidak. Indikator kriteri penilaian efektivitas kartu tani dapat dilihat pada lampiran.

Analisis Data

Analisis efektivitas program kartu tani diukur berdasarkan indikator enam tepat yaitu tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, jumlah, mutu dan tepat jenis. Penilaian Efektifitas Dan Indikator Penggunaan Kartu Tani dapat dilihat pada Tabel 1.

Untuk melihat efektifitas program kartu tani secara keseluruhan di Kelurahan Kuranji, maka di analisa

$$(i h i) - (i jh ii) 2$$

$$\text{Range} = (12 \times 42 \times 2) - (12 \times 42 \times 1) 2 = 1008 - 504 2 = 5042 = 252$$

Jadi untuk menentukan kriteria Efektivitas dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Kriteria Efektivitas

No.	Kelas Interval	Kriteria
1	504 – 756	Tidak Efektif
2	757 – 1008	Efektif

Untuk melihat efektifitas program kartu tani per indikator penelitian, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$(sub i h i) - (sub i jh ii) 2$$

Range = $2 \times 42 \times 2 - 2 \times 42 \times 12 = 168 - 842 = 842 = 42 - 1 = 41$

Jadi kriteria efektifitas per indikator penelitian disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Kriteria Efektivitas Berdasarkan Asas Ketepatan

No.	Kelas Interval	Kriteria
1	84 – 126	Tidak Efektif
2	127 – 168	Efektif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketepatan Harga

Menunjukkan bahwa hanya 2 jenis pupuk yang disalurkan kepada petani dan memiliki kesesuaian harga dengan HET yang telah ditetapkan sebelumnya, sedangkan untuk jenis pupuk lainnya seperti ZA, NPK Formula Khusus Sp36, dan juga organik cair dijual dengan harga yang tidak subsidi, hal ini dikarenakan pihak dari pemerintah hanya menyediakan 2 jenis pupuk bersubsidi tersebut. Untuk harga pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang telah di ajukan sebelumnya berdasarkan rdck dan juga, sehingga pihak yang menjual pupuk tersebut tidak akan bisa melakukan kecurangan dan para petani juga akan mendapatkan harga yang sama sesuai dengan yang ditetapkan.

Petani yang mendapatkan pupuk sesuai dengan HET merupakan petani yang sudah tergabung kedalam RDCK kelompok patamuan, sedangkan petani yang tidak tergabung kedalam RDCK tidak dapat mengambil pupuk subsidi dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Sehingga berdasarkan data dilapangan, diketahui bahwa petani yang tidak tergabung kedalam RDCK membeli pupuk urea dan posca dengan harga berbeda dengan yang bersubsidi.

Ketepatan Jumlah

Tepat jumlah artinya jumlah pupuk bersubsidi yang diterima oleh petani sudah sesuai dengan jumlah yang ditetapkan di RDCK. Semua responden sudah menerima jumlah pupuk sesuai dengan yang ditetapkan didalam RDCK, hal tersebut disebabkan karena pembelian pupuk bersubsidi menggunakan

kartu tani dilakukan sistem pembatasan sesuai dengan alokasi yang sudah ditetapkan, sehingga petani tidak bisa membeli pupuk secara berlebihan karena terdapat pembatasan jumlah pupuk untuk setiap petani.

Ketepatan Tempat

Ketepatan tempat yaitu tempat seharusnya petani bisa mendapatkan pupuk bersubsidi, sesuai dengan Peraturan Juknis (Ta 2020) pupuk bersubsidi bisa didapatkan petani pada pengecer resmi pupuk bersubsidi yang bertanggung jawab atas kelompok tani di wilayahnya. Semua responden membeli pupuk di pengecer resmi yang sebelumnya telah ditetapkan yaitu di kios Anugrah. Hal itu terjadi berdasarkan hasil wawancara dengan Pemilik kios resmi, saat ini sudah tidak ada kios pengecer pupuk bersubsidi yang tidak resmi di Kelurahan kurangi, karena terdapat Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) yang bekerjasama dengan aparat keamanan yang secara rutin dan berkala melakukan pengawasan terhadap kios-kios pengecer pupuk bersubsidi.

Ketepatan Waktu

Menunjukkan bahwa sebanyak 28 petani mengatakan sesuai untuk ketepatan waktu untuk waktu ketersediaan pupuk Urea dan Phonskha. Dan 14 petani mengatakan tidak tepat waktu untuk 2 jenis pupuk tersebut, Hal ini terjadi karena petani memiliki kendala di keuangan dan terlambat melakukan pembelian pupuk, akan tetapi jika dilihat di data yang ada dikios semua petani di kelompok tani patamuan pada musim tanam 2021, telah mendapatkan jumlah pupuk sesuai dengan yang ada didalam RDCK untuk pupuk Urea dan Phonskha. Sedangkan untuk 5 jenis pupuk lainnya tidak ada batas waktu dikarenakan jenis pupuk tersebut dijual dengan non subsidi. Oleh karena itu petani menebus pupuk tersebut sesuai dengan keinginannya.

Berdasarkan wawancara dengan ketua kelompok tani, batas toleransi keterlambatan Pembelian pupuk untuk pupuk Urea dan Phonskha adalah satu bulan terhitung saat musim tanam, jadi petani yang menyatakan sesuai untuk asas tepat waktu mendapatkan pupuk bersubsidi adalah petani yang telah tergabung kedalam rdck.

Ketepatan Mutu

Menunjukkan bahwa semua responden membeli pupuk jenis urea, npk, za, sp36, npk formula khusus, organik cair dan organik granul sudah berlogo SNI. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi dari segi ketepatan mutu dikategorikan sesuai. Hal ini terjadi karena pupuk yang didapatkan seluruh responden di harus bersertifikat SNI yang peraturannya tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17/M-IND/PER/3/2016 yang berisi tentang Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Pupuk yang kemudian disebut SPPT-SNI pupuk yang merupakan sertifikat dan dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) kepada produsen yang mampu memproduksi pupuk sesuai dengan persyaratan SNI. Logo SNI pupuk bersubsidi sendiri terdapat di bagian bawah sebelah kanan kemasan pupuk, sedangkan kode SNI terdapat dibawah logo SNI. Di bawah nomor SNI terdapat kode LSPro dan di bawah kode LSPro terdapat Nomor Registrasi Produk (NRP). Logo SNI, nomor SNI, kode LSPro, dan Nomor Registrasi Produk (NRP) dicetak dengan warna hitam. Pada pupuk Urea, ZA, dan SP-36 logo SNI, nomor SNI, kode LSPro, dan Nomor Registrasi Produk (NRP) terletak di bagian bawah sebelah kiri kemasan sedangkan pada pupuk NPK, logo SNI, nomor SNI, kode LSPro, dan Nomor Registrasi Produk (NRP) terletak di bagian tengah bawah kemasan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama penyuluh dan pemilik kios anugrah ada beberapa hal mampu merusak mutu pupuk, diantaranya, tempat penyimpanan pupuk atau gudang pupuk yang lembab sehingga pupuk bisa berjamur dan mengeras, pupuk terkena air, dan juga karena lamanya penyimpanan dalam gudang.

Ketepatan Jenis

Jenis pupuk bersubsidi yang diterima petani yang sesuai dengan yang ditetapkan sebelumnya, akan tetapi hanya jenis pupuk urea dan npk phonskha sedangkan untuk jenis pupuk lainnya didapatkan petani tapi tidak dengan subsidi hal itu karena pihak dari pemerintah hanya menyiapkan dua jenis pupuk tersebut untuk pupuk bersubsidi. Sedangkan untuk jenis pupuk yang lainnya masih dibeli dan ditebus oleh petani tetapi tidak dengan bersubsidi hal ini terjadi karena petani masih membutuhkan jenis pupuk tersebut untuk melakukan usaha taninya, sehingga penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan ketepatan jenis di kelompok tani Patamuan dikategorikan tidak sesuai, karena hanya dua jenis pupuk bersubsidi yang disalurkan kios ke petani sedangkan menurut juknis 2021 ada 7 jenis pupuk yang disalurkan pemerintah untuk petani

KESIMPULAN

Penyaluran pupuk bersubsidi sangat membantu petani dalam melaksanakan usaha taninya, penyaluran pupuk bersubsidi di Kelompok Tani Patamuan Kota Padang jika ditinjau berdasarkan prinsip 6 ketepatan didapatkan hasil dengan kategori tidak sesuai dengan yang ditetapkan didalam Juknis 2021, hal itu terjadi karena pihak dari pemerintah hanya menyediakan dua jenis pupuk yang bersubsidi yaitu jenis pupuk urea dan NPK.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirin, T. M. (2009). Subjek penelitian, responden penelitian, dan informan (narasumber) penelitian. Diakses dari <http://tatangmanguny.wordpress.com/2009/04/21/subjek-responden-informan-penelitian/>.
- Angrayni, L., & Yusliati. (2018). Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia. Hlm14

- Ashari, Dkk. (2019) Analisis efektivitas program kartu tani di kecamatan banjarnegara kabupaten banjarnegara. Universitas Diponegoro Hlm .2{Skripsi}
- Handoko, R. dan P. Patriadi. 2005. "Evaluasi Kebijakan Subsidi NonBBM". Kajian Ekonomi dan Keuangan, 9: 42-64. Jakarta. Hidayat.1986. Teori Efektivitas Dalam Kinerja karyawan.Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2017). Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta. Andi. Hlm 134 . MutiarinSES, Dyah, Arif, Zaenudin. 2014. Manajemen Birokrasi dan Kebijakan Penelusuran Konsep dan Teori. Yogyakarta: Pustaka
- Pelajar Perdagangan, K. (2013). Permendag RI No. 15/M-DAG/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Jakarta: Kemendag RI. Permentan. 2017. Konsumsi Pupuk Bersubsidi sektor Pertanian di Indonesia Tahun 2013-2017 (Ton/Tahun). Jakarta.
- Ramlayana. 2020. Efektivitas program penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani padi di desa langi kecamatan bontocani kabupaten bone. Universitas Muhammadiyah Makasar. Hlm 23. {Skripsi}
- Rahman, Benny. 2009. Kebijakan Subsidi Pupuk: Tinjauan Terhadap Aspek Teknis, Manajemen dan Regulasi. Jakarta: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Rakhmawati, T. (2013). Analisis Efektivitas Subsidi Pupuk dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Padi (Studi Kasus Desa Hambaro, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor). bogor.Hlm 31
- Sihite, B. (2021). Implementasi Program Kartu Tani dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi. Sutopo. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:Alfabeta.
- Ramlayana. 2020. Efektivitas program penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani padi di desa langi kecamatan bontocani kabupaten bone. Universitas Muhammadiyah Makasar. Hlm 23. {Skripsi}
- Widjaja, 1993. Komunikasi dan hubungan masyarakat, Jakarta: Bumi Aksara.Hlm32